

IMPLEMENTASI PROGRAM JEMPUT BOLA DALAM PENGGUNAAN APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang)

Abrory Malikur Rohman¹, Didik Supriyanto², Hirshi Anadza³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam
Malang, Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
E-mail: abrorymr05@gmail.com*

ABSTRAK

Dilansir dari website resmi dispendukcapil kota malang pada bulan Oktober jumlah capaian aktivasi IKD sebanyak 69.587. sedangkan jumlah masyarakat Kota Malang sebesar 885.271 jiwa, artinya hingga saat ini dispendukcapil kota malang masih mencapai 7,9% dari jumlah masyarakat kota malang dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sementara untuk target dari Dispendukcapil kurang lebih sebanyak 160 ribu warga sudah harus aktivasi IKD hingga akhir pekan 2024. Tujuan penelitian ini Untuk mendeskripsikan Implementasi program jemput bola dalam penggunaan aplikasi identitas kependudukan digital di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deksriptif. Penelitian menemukan bahwa dukungan masyarakat masih kurang maksimal akibat kekhawatiran terkait keamanan data digital dan ketidakpastian mengenai kepemilikan KTP fisik. Selain itu, infrastruktur yang belum merata menjadi kendala dalam pelaksanaan layanan digital ini. Dispendukcapil merekomendasikan adanya dorongan dan sosialisasi terpadu dari pemerintah pusat serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat aktivasi IKD. bahwa program jemput bola Dispendukcapil telah bekerja dengan baik terkait pemberian informasi terhadap masyarakat mengenai aplikasi IKD dengan program jemput bola. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dalam implementasi program ini, termasuk kesenjangan digital di kalangan masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah, kecemasan masyarakat terhadap aplikasi IKD. Saran dari penelitian ini adalah peningkatan sosialisasi pemahaman teknologi, evaluasi target pencapaian, penguatan kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Jemput Bola, IKD, Dispendukcapil

Pendahuluan

Dispendukcapil Kota Malang merupakan salah satu instansi yang menyediakan layanan publik. Untuk meningkatkan penggunaan teknologi dalam administrasi kependudukan, Disdukcapil mengadopsi inovasi dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bawah Kementerian Dalam Negeri telah memperkenalkan program KTP digital yang dikenal sebagai Identitas Kependudukan Digital (IKD). Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022, IKD merupakan bentuk digital dari dokumen kependudukan serta data yang terkait, yang dapat diakses melalui aplikasi pada perangkat seluler. IKD menampilkan informasi pribadi yang berfungsi sebagai identitas resmi seseorang. Dengan kehadiran IKD, diharapkan masyarakat dapat melakukan berbagai transaksi layanan publik maupun privat dengan lebih cepat dan mudah dalam bentuk digital.

Identitas Kependudukan Digital merupakan bentuk digital dari dokumen identitas yang bisa diakses secara daring. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan

Pencatatan Sipil (Dukcapil), tengah merencanakan penerapan IKD secara bertahap. Meski masyarakat telah memiliki E-KTP, IKD tetap dikembangkan karena menawarkan fitur yang lebih komprehensif, seperti kemampuan menyimpan dokumen kependudukan lain seperti akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK). Implementasi IKD bertujuan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi, mendorong pemanfaatan layanan digital oleh masyarakat, serta mempercepat dan mempermudah akses terhadap layanan publik maupun swasta secara digital (Afriyadi & Pratama, 2024:34).

Dispendukcapil Kota Malang sedang melaksanakan program jemput bola untuk mendorong masyarakat dalam mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Saat ini, Dispendukcapil menargetkan 160 ribu warga Kota Malang untuk melakukan aktivasi IKD, yang mencakup sekitar 25% dari total penduduk yang memiliki e-KTP. Namun, hingga saat ini, hanya sekitar 64 ribu warga yang telah berhasil mengaktifkan IKD (Winahyu, 2024).

“Kepala Dispendukcapil Kota Malang, Dahliana Lusi Ratnasari, mengungkapkan

bahwa banyak warga yang belum sepenuhnya memahami fungsi dan manfaat dari IKD. Beberapa di antara mereka beranggapan bahwa memiliki IKD berarti KTP fisik mereka akan dicabut. Untuk mengatasi hal ini, Dispendukcapil telah melakukan sosialisasi dan perekaman di berbagai instansi pemerintah serta tempat umum seperti mall.”(Wijaya, 2024)

Tahun	Jumlah Warga yang Teraktivasi	Target Aktivasi
2023	36.387	47.000
2024	79.880	160.000
2025 (Maret)	83.219	160.000

Hal ini dapat dilihat dari penurunan pencapaian antara tahun 2023 dan 2024. Dilansir dari website resmi dispendukcapil kota malang pada bulan Oktober jumlah capaian aktivasi IKD sebanyak 69.587. sedangkan jumlah masyarakat Kota Malang sebesar 885.271 jiwa, artinya hingga saat ini dispendukcapil kota malang masih mencapai 7,9% dari jumlah masyarakat kota malang dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sementara itu, Dispendukcapil menargetkan sekitar 160 ribu penduduk telah melakukan aktivasi IKD sebelum akhir tahun 2024(Wijaya, 2024). Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“IMPLEMENTASI PROGRAM JEMPUT BOLA DALAM PENGGUNAAN APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program jemput bola dalam penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung implementasi program jemput bola dalam penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi program jemput bola dalam penggunaan aplikasi identitas kependudukan digital di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung Implementasi program jemput bola dalam penggunaan aplikasi identitas kependudukan digital di Kota Malang.

Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini juga memberikan manfaat

secara teoritis dengan berkontribusi dalam pengembangan konsep implementasi kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan berbasis digital. Kontribusi ini penting untuk memperkaya pemahaman tentang bagaimana kebijakan digital dapat diterapkan secara efektif dalam memberikan layanan publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengasah dan memperluas kemampuan berpikir kritis melalui penyusunan karya ilmiah, sekaligus menjadi sarana untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari selama menjalani pendidikan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang..
- b. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, manfaat yang diperoleh dari program ini adalah sebagai sumber informasi dan bahan evaluasi untuk mencapai target pengguna aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Malang. Program ini membantu dalam pemantauan dan peningkatan aktivasi aplikasi IKD di masyarakat sehingga dapat mendukung percepatan digitalisasi layanan administrasi kependudukan di wilayah tersebut
- c. Bagi mahasiswa, penelitian ini bisa menjadi sumber bacaan dan perbandingan saat menghadapi masalah yang serupa, baik di masa depan maupun yang sedang dihadapi sekarang.

Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Publik

Menurut The Liang Gie (1999:14), administrasi adalah serangkaian pengaturan menyeluruh terhadap pekerjaan utama yang dilakukan secara kolektif oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu(Nurhapani, 2020: 9).

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik, dilihat dari aspek proses, lingkungan kebijakan, hirarki, serta para aktor yang terlibat dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami. Pemahaman ini menjadi dasar yang fundamental dalam mempelajari ilmu tersebut, termasuk pemahaman awal tentang konsep kebijakan publik(Kadji.Y, 2015:5).

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan, menurut Sumaryadi (2005:80), adalah hasil yang diperoleh saat melaksanakan suatu kebijakan, di mana akan ada beberapa harapan yang mungkin berbeda dari realitas yang terjadi. Jan Merse (dalam Kadji.Y, 2015:70) Setiap implementasi kebijakan membutuhkan keterlibatan dan dukungan dari masyarakat sebagai salah satu pihak berkepentingan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat memegang peran krusial dalam keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan dan sosial. Menurut Jan Merse, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi model implementasi kebijakan, yaitu informasi, substansi kebijakan, dukungan publik, serta distribusi potensi yang dimiliki.

4. E-Government

E-government adalah suatu proses dalam penyelenggaraan layanan publik oleh lembaga pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan teknologi ini memungkinkan tata kelola pemerintahan menjadi lebih efisien serta berkontribusi terhadap transformasi sosial dalam masyarakat (Ali et al., 2018:7).

5. Jemput Bola

Program Jemput Bola merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 mengenai Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan. Pasal 2 Ayat (2) menyatakan bahwa peningkatan mutu layanan administrasi kependudukan dapat dilaksanakan melalui pendekatan layanan terintegrasi maupun jemput bola. Sebagai implementasinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan program tersebut dengan mengirimkan petugas langsung ke kecamatan atau desa guna memberikan bantuan kepada masyarakat dalam proses pengurusan dokumen kependudukan (Hidayat et al., 2024:715).

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih oleh penulis untuk memperoleh gambaran nyata mengenai situasi di lapangan melalui kegiatan observasi. Melalui metode ini, penulis dapat memahami serta menganalisis proses pelaksanaan kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Kota Malang, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat dalam model tata kelola kebijakan tersebut.

Fokus Penelitian

Menurut Miles & Huberman (2014:7), fokus penelitian ditetapkan sebelum memasuki lapangan dan dapat disempurnakan selama proses penelitian berlangsung. Oleh karena itu, focus penelitian menjadi inti dari rumusan masalah yang disusun sebelum penelitian berlangsung. Berdasarkan rumusan masalah, peneliti menentukan focus penelitian terkait Implementasi Program Jemput Bola Dalam Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Malang dilihat melalui indikator implementasi kebijakan menurut Jan Merse yang terdiri dari 4 indikator yaitu

- 1) Informasi
- 2) Isi Kebijakan
- 3) Dukungan Masyarakat
- 4) Pembagian Potensi

Situs dan Latar Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yang beralamat di Kompleks Perkantoran Terpadu, Jalan Mayjen Sungkono, Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65132. Lokasi ini dipilih karena instansi tersebut memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam mengelola administrasi kependudukan di wilayah Kota Malang.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil pengumpulan informasi yang dilakukan langsung oleh penulis selama proses penelitian:

a) Sumber Primer

Sumber ini berasal dari objek langsung, di mana data harus didapatkan dari objeknya (Sugiono, 2018: 456.). Dalam penelitian ini, sumber data utama diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan narasumber dari Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data.

b) Sumber Sekunder

Sumber ini mencakup berbagai referensi seperti buku, jurnal, artikel, berita dan fakta lapangan yang diperoleh oleh penulis.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiono, 2018:456) dalam konteks alamiah, data primer menggunakan teknik yang berfokus pada observasi, wawancara mendalam, serta pemanfaatan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a) Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan topik penelitian mengenai Implementasi program jemput bola dalam penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Malang.

b) Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung lingkungan dan lokasi penelitian.

- c) Dokumentasi
Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang memanfaatkan arsip atau dokumen sebagai sumber informasi, yang dapat dilakukan melalui pengamatan, pencatatan, dan pengambilan gambar. Proses pengumpulan informasi mengenai objek atau variabel dikenal sebagai dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:8), analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses yang dilakukan secara berkesinambungan, baik selama pengumpulan data berlangsung maupun setelah seluruh data terkumpul dalam kurun waktu tertentu. Analisis ini tidak bersifat linier, melainkan siklikal dan iteratif. Adapun tahapan-tahapan dalam analisis data menurut mereka meliputi.:

- a) Kondensasi Data
Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, penekanan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan/atau transformasi data yang terdapat dalam keseluruhan kumpulan catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya. Dengan melakukan kondensasi, kita memperkuat data yang ada.
- b) Penyajian Data
Langkah berikutnya adalah menyajikan data. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009:341) menyatakan bahwa cara yang paling umum digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah melalui teks naratif
- c) Pengumpulan Data
Setelah data terkumpul dalam penelitian ini, tahap berikutnya adalah mengolah data dengan melakukan analisis, membuat deskripsi, dan menarik kesimpulan. Teknik yang digunakan adalah analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh berupa penjelasan-penjelasan(Moleong, 2002).
- d) Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan adalah fase terakhir dalam rangkaian proses pengumpulan dan penyajian data. Kesimpulan ditentukan berdasarkan hasil penelitian yang melibatkan analisis dari data awal seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi yang sebelumnya belum siap untuk dianalisis secara langsung. Kesimpulan baru dapat dirumuskan setelah data tersebut mengalami proses reduksi dan

penyajian secara sistematis(Moleong, 2002).

Pembahasan

Pada penelitian ini, peneliti mencoba menganalisis implementasi program jemput bola dalam penggunaan aplikasi identitas kependudukan digital Kota Malang melalui teori Menurut Jan Merse, terdapat empat indikator utama yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: ketersediaan informasi, substansi atau muatan kebijakan, tingkat dukungan dari masyarakat, serta distribusi atau alokasi potensi yang ada.

a) Informasi

Dalam proses penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa Dispendukcapil Kota Malang sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses penyelenggaraan jemput bola aplikasi IKD, secara aktif memberikan pengenalan inovasi terbaru ini melalui sosialisasi, penyebaran flyer-flyer, dan penggunaan social media. Yang telah dilakukan oleh pihak Dispendukcapil melalui program jemput bola dalam pengenalan aplikasi IKD. Dispendukcapil Kota Malang dinilai akurat dalam menyampaikan informasi mengenai aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Akurasi ini tercermin dari ketepatan sasaran dalam penyampaian informasi, di mana Dispendukcapil memastikan bahwa informasi terkait IKD benar-benar ditujukan kepada masyarakat pengguna layanan, khususnya warga Kota Malang yang memiliki KTP elektronik. Sosialisasi dilakukan secara langsung di berbagai titik layanan . Sehingga informasi yang diberikan tepat dan sesuai kebutuhan masyarakat

b) Isi Kebijakan

Sasaran utama program ini adalah seluruh warga Kota Malang yang memiliki KTP elektronik, dengan target aktivasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebesar 25 persen dari total penduduk pemilik KTP, yaitu sekitar 160 ribu orang pada tahun 2024. Pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti, hingga saat ini jumlah aktivasi baru mencapai 83.219 pada bulan Maret.

Namun berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis, pihak Dispendukcapil memberikan saran agar terdapat dorongan dari pemerintah pusat untuk menguatkan dan mensosialisasikan kebijakan tersebut, baik melalui Peraturan Pemerintah (PP) maupun peraturan dalam negeri yang relevan. Kebijakan terkait Identifikasi Kepemilikan Dokumen (IKD) perlu dikampanyekan secara terpadu. Seluruh pemangku kepentingan, baik dari instansi pusat, daerah, maupun sektor publik dan swasta, harus terlibat dalam pelaksanaannya.

c) Dukungan Masyarakat

Berdasarkan penelitian dan observasi yang penulis peroleh, tingkat dukungan masyarakat terhadap inovasi terbaru ini belum bisa dikatakan

maksimal, dikarenakan kurangnya rasa percaya terhadap tingkat keamanan yang dimiliki oleh aplikasi IKD. Masyarakat menilai data kependudukan yang diakses secara digital melalui aplikasi IKD memiliki resiko seperti, kejahatan siber, kebocoran data, dan penipuan phising.

Namun salah satu faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target pemerintah dalam meningkatkan penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah kekhawatiran masyarakat bahwa dengan menggunakan aplikasi tersebut, mereka tidak akan memperoleh KTP fisik. Selain itu, kondisi infrastruktur di Indonesia belum sepenuhnya mendukung kebutuhan masyarakat dalam proses pengurusan pelayanan administrasi di beberapa instansi pemerintah maupun sektor swasta. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan layanan publik yang mengandalkan aplikasi IKD.

d) Pembagian Potensi

Pada saat peluncuran inovasi terbaru ini, Pihak Dispendukcapil juga mengenalkan terlebih dahulu terhadap para pegawai di Dispendukcapil, hal ini dilaksanakan agar tidak adanya miskomunikasi nantinya terhadap warga pada saat melakukan sosialisasi jemput bola Aplikasi IKD. Dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, diharapkan program jemput bola IKD dapat berjalan dengan lancar dan mencapai target yang ditetapkan. Kerjasama yang baik antara Stakeholder dan masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan program ini.

e) Faktor Pendorong dan Penghambat

a. Faktor Internal

Salah satu hambatan yang dihadapi Dispendukcapil berasal dari struktur kerja yang mengikat lembaga atau pihak terkait berdasarkan perjanjian kerja dengan pemerintah pusat, khususnya kementerian. Hal ini memberikan ruang gerak dan kewenangan pihak tersebut terbatas karena harus mengikuti aturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan pusat, yang dimana menyebabkan keterbatasan pengambilan keputusan di tingkat daerah atau operator

b. Faktor Eksternal

• Stakeholder

Hambatan eksternal yang signifikan bagi Dispendukcapil datang dari *stakeholder* itu sendiri. Sebagian besar *stakeholder* belum sepenuhnya memberlakukan IKD disetiap persyaratan pelayanan. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam adopsi teknologi baru di berbagai instansi pemerintah dan swasta, faktor seperti kesiapan teknologi, regulasi, dan koordinasi antar lembaga menjadi kunci dalam memperluas penggunaan IKD

• Masyarakat

Selain stakeholder dari instansi atau pemerintah daerah, masyarakat juga menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi IKD. Tingkat pemahaman IKD di kalangan masyarakat masih rendah. Masyarakat cenderung masih

mengandalkan KTP fisik karena banyak instansi yang masih meminta KTP fisik dalam proses pelayanan. Hal ini membuat masyarakat merasa perlu untuk tetap memiliki KTP fisik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan data yang dipaparkan pada pembahasan tersebut, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa program jemput bola Dispendukcapil telah bekerja dengan baik terkait pemberian informasi terhadap masyarakat mengenai aplikasi IKD dengan program jemput bola. Selain itu, pelaksanaan program jemput bola ini selaras sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh Dispendukcapil, yaitu meningkatkan aktivasi dan pemanfaatan aplikasi IKD di kalangan warga Kota Malang.

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan aktif dan partisipasi penuh dari masyarakat sebagai pengguna layanan. Tanpa keterlibatan masyarakat secara sadar dan antusias dalam mengikuti proses sosialisasi, aktivasi, serta pemanfaatan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), tujuan program tidak akan tercapai secara optimal.

Meskipun demikian, Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala dalam pelaksanaan implementasi. Program ini, termasuk kesenjangan digital di kalangan masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah, kecemasan masyarakat terhadap aplikasi IKD, serta perlunya adaptasi baik dari aparatur pemerintah maupun masyarakat terhadap sistem baru ini

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran untuk implementasi program jemput bola aplikasi identitas kependudukan digital antara lain yaitu:

Pertama, Peningkatan Sosialisasi Pemahaman Teknologi. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan aplikasi IKD. Perlu adanya sosialisasi khususnya kepada masyarakat terhadap penggunaan teknologi ini, terutama pada masyarakat yang kurang melek teknologi. Dispendukcapil perlu memberikan dorongan dan pembinaan kepada para Ketua RT dan RW sebagai pemimpin setempat agar mereka dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program kependudukan secara efektif dan tepat sasaran.

Kedua, Evaluasi Target Pencapaian. Penetapan target tahunan sebaiknya dievaluasi kembali dengan memperhatikan kemampuan yang tersedia serta hambatan yang dihadapi di lapangan, agar target yang ditetapkan menjadi lebih realistis dan dapat dicapai.

Ketiga, Penguatan Kebijakan. Dengan adanya penguatan regulasi yang jelas dan komprehensif, disertai dengan kampanye nasional yang masif dan terarah untuk meningkatkan kesadaran serta

pemahaman masyarakat, serta integrasi lintas sektor yang melibatkan berbagai instansi pemerintah dan swasta.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Kadji, Y. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: Ung Press Gorontalo.
- Sumaryadi, I. N. (2005). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd Ed.). Thousand Oaks, Ca: Sage Publications
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Moleong, Lj. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang:

- Kementerian Dalam Negeri (2022). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital*. Jakarta : Kementrian Dalam Negeri.

Sumber Jurnal:

- Afriyadi, R., & Pratama, M. G. (2024, October). *Prosedur Administasi Pembuatan Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi*. In *Semnastera (Seminar Nasional Teknologi Dan Riset Terapan)* (Vol. 6, Pp. 93-100).
- Nurhapani, N. (2020). *Perkembangan Ilmu Administrasi Dan Fungsinya Untuk Mendukung Perkembangan Ilmu Administrasi*. *Ensiklopedia Social Review*, 2(1), 9-13.
- Ali. M. A., Hoque, M. R., & Alam, K. (2018). *An Empirical Investigation Of The Relationship Between E-Government Development And The Digital Economy: The Case Of Asian Countries*. *Journal Of Knowledge Management*, 22(5), 1176-1200.

- Hidayat, H., Budiman, A., & Raudah, S. (2024). *Implementasi Program Jemput Bola Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Balangan*. *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(3), 714-720.

Sumber internet:

- Djoko Winahyu (2024). *Kejar Target 25 % Dispendukcapil Kota Malang Terus Genjot Aktivasi Ikd*. Malang Pariwara Di Akses Tanggal 2 November 2024. <https://Malangpariwara.Com/2024/04/23/Kejar-Target-25-Dispendukcapil-Kota-Malang-Terus-Genjot-Aktivasi-Ikd/>
- Wijaya.R (2024). *Aktivasi Ikd Di Kota Malang Masih Rendah, Ternyata Banyak Warga Yang Tak Paham*. Jatim Times Di Akses Tanggal 5 November 2024. <https://Jatimtimes.Com/Baca/310712/20240425/105900/Aktivasi-Ikd-Di-Kota-Malang-Masih-Rendah-Ternyata-Banyak-Warga-Yang-Tak-Paham>